BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewenangan tersebut diikuti dengan tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, melaksanakan pembangunan daerah, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan tanggung jawab tersebut tercermin dalam kinerja pemerintah daerah sebagai hasil penyelenggaraan pemerintahan selama periode tertentu. Kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan yang dimiliki (Ditasari et al., 2020). Pencapaian kinerja pemerintah daerah dipengaruhi oleh berbagai aspek, termasuk pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel (Sukman et al., 2025).

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai instrumen utama dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Akuntabilitas pengelolaan keuangan tersebut dievaluasi melalui pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil pemeriksaan BPK menghasilkan opini audit serta temuan audit yang memberikan informasi mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan dan

berbagai permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah. Informasi tersebut menjadi salah satu bahan evaluasi dalam menilai kualitas tata kelola keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, hubungan antara hasil pemeriksaan BPK dan kinerja pemerintah daerah menjadi isu yang menarik untuk dikaji (Pradnyani et al., 2020).

Berdasarkan publikasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur secara konsisten memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan dalam beberapa tahun terakhir. Pada Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali memperoleh opini WTP dan sebagian besar pemerintah kabupaten/kota juga memperoleh opini yang sama. Opini tersebut menunjukkan bahwa laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan kriteria pemeriksaan yang berlaku. Meskipun demikian, pencapaian opini WTP tidak selalu mencerminkan kondisi kinerja pemerintah daerah yang sama pada setiap daerah. Perbedaan tersebut menjadi salah satu aspek yang menarik untuk dikaji lebih lanjut.

Selain opini audit, hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga memuat temuan audit yang menggambarkan berbagai permasalahan dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Temuan audit dapat berupa kelemahan sistem pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) BPK, pemerintah daerah yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) masih dapat menerima temuan audit beserta rekomendasi perbaikan atas pengelolaan aset, pelaksanaan belanja

daerah, maupun kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa opini audit dan temuan audit merupakan dua informasi yang memiliki karakteristik berbeda dalam menggambarkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Perbedaan karakteristik tersebut menjadikan temuan audit sebagai salah satu faktor yang menarik untuk dikaji dalam hubungannya dengan kinerja pemerintah daerah.

Selain hasil pemeriksaan BPK, kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan juga menjadi aspek yang berkaitan dengan pencapaian kinerja pemerintah daerah. Kemampuan tersebut tercermin melalui tingkat kemandirian keuangan daerah yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan daerah menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Anynda et al., 2020). Tingkat kemandirian keuangan yang lebih tinggi memberikan ruang fiskal yang lebih luas bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan dan pelayanan publik. Sebaliknya, daerah dengan tingkat kemandirian yang rendah cenderung masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Perbedaan tingkat kemandirian keuangan antardaerah memungkinkan pencapaian kinerja pemerintah daerah juga menunjukkan kondisi yang berbeda.

Fenomena terkait hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga dapat ditemukan pada pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur. Meskipun Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025,

BPK masih menemukan sejumlah permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan pemberitaan Kompas.com tanggal 10 Juni 2026, BPK menemukan tiga permasalahan dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 yang meliputi pengelolaan belanja daerah, pelaksanaan program, serta aspek kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku (Kompas.com, 2026). Selain itu, berdasarkan pemberitaan Jatim Pos, BPK juga menemukan adanya keterlambatan penyelesaian proyek yang belum dikenakan denda keterlambatan, permasalahan bantuan keuangan desa yang menimbulkan kelebihan pembayaran akibat kekurangan volume pekerjaan, serta pengelolaan jaminan reklamasi dan pascatambang yang belum memadai pada sektor pertambangan (Jatim Pos, 2026).

Penelitian mengenai pengaruh opini audit, temuan audit, dan tingkat kemandirian keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah telah banyak dilakukan. Namun, hasil penelitian terdahulu masih menunjukkan temuan yang belum konsisten. Pradnyani et al., (2020) menemukan bahwa opini audit berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah, sedangkan Zahrah et al., (2024) menunjukkan bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Ditasari et al., (2020) memperoleh hasil bahwa temuan audit berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah, sedangkan Aziz et al., (2024) menemukan bahwa temuan audit tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Hasil penelitian mengenai tingkat kemandirian keuangan daerah juga menunjukkan inkonsistensi. Anynda et al., (2020) menemukan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja

pemerintah daerah, sedangkan Hakiki et al., (2023) menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Selain adanya inkonsistensi hasil penelitian, sebagian besar penelitian terdahulu menempatkan tingkat kemandirian keuangan daerah sebagai variabel independen yang memengaruhi kinerja pemerintah daerah secara langsung. Sementara itu, penelitian yang menggunakan tingkat kemandirian keuangan daerah sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara opini audit, temuan audit, dan kinerja pemerintah daerah masih relatif terbatas. Penggunaan tingkat kemandirian keuangan daerah sebagai variabel moderasi diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara hasil pemeriksaan BPK dan kinerja pemerintah daerah pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan fenomena empiris, perbedaan hasil penelitian terdahulu, serta masih terbatasnya penelitian yang menggunakan tingkat kemandirian keuangan daerah sebagai variabel moderasi, penelitian ini dilakukan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh opini audit dan temuan audit BPK terhadap kinerja pemerintah daerah dengan tingkat kemandirian keuangan daerah sebagai variabel moderasi pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur periode 2021-2024.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terfokus dan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan, maka ditentukan beberapa batasan masalah sebagai berikut:

1 Penelitian ini dilakukan pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur sebagai objek penelitian.

2 Variabel independen dalam penelitian ini terdiri atas Opini Audit dan Temuan Audit BPK. Variabel-variabel tersebut dipilih karena mencerminkan aspek akuntabilitas dan kepatuhan dalam pengelolaan keuangan daerah yang diduga memengaruhi variabel dependen, yaitu Kinerja Pemerintah Daerah. Selanjutnya, Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah digunakan sebagai variabel moderasi untuk menguji kemampuannya dalam memperkuat atau memperlemah pengaruh antara variabel independen dan Kinerja Pemerintah Daerah.

3 Rentang waktu penelitian dibatasi pada periode 2021-2024. Periode ini dipilih karena mencerminkan dinamika pengelolaan keuangan daerah pada berbagai kondisi, mulai dari periode sebelum pandemi COVID-19, masa pandemi yang berdampak pada kapasitas fiskal dan perubahan prioritas belanja daerah, hingga periode pemulihan dan penyesuaian kebijakan fiskal pada era pascapandemi. Variasi kondisi tersebut menjadikan periode ini relevan untuk menganalisis pengaruh Opini Audit dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah secara lebih komprehensif dengan mempertimbangkan peran moderasi Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1 Apakah Opini Audit berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada kabupaten/kota di Jawa Timur periode 2021-2024?
2 Apakah Temuan Audit BPK berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada kabupaten/kota di Jawa Timur periode 2021-2024?
3 Apakah Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah mampu memoderasi pengaruh Opini Audit terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada kabupaten/kota di Jawa Timur periode 2021-2024?
4 Apakah Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah mampu memoderasi pengaruh Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada kabupaten/kota di Jawa Timur periode 2021-2024?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1 Untuk menguji secara empiris pengaruh Opini Audit terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur periode 2021-2024.
2 Untuk menguji secara empiris pengaruh Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur periode 2021-2024.
3 Untuk menguji secara empiris peran Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dalam memoderasi pengaruh Opini Audit terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur periode 2021-2024.

4 Untuk menguji secara empiris peran Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dalam memoderasi pengaruh Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur periode 2021–2024.

E. Kegunaan Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian akuntansi sektor publik, khususnya yang berkaitan dengan hubungan antara Opini Audit, Temuan Audit BPK, Kinerja Pemerintah Daerah, dan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Penelitian ini dilandasi oleh pemahaman bahwa opini audit dan temuan audit merupakan bagian dari mekanisme pengawasan yang digunakan untuk menilai akuntabilitas serta kualitas pengelolaan keuangan daerah. Di sisi lain, tingkat kemandirian keuangan daerah mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan melalui sumber-sumber pendapatan asli daerah. Dengan mempertimbangkan keterkaitan antarvariabel tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi ilmiah mengenai faktor-faktor yang berkaitan dengan Kinerja Pemerintah Daerah serta memperluas kajian mengenai peran variabel moderasi dalam penelitian sektor publik.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya tindak lanjut atas hasil pemeriksaan serta penguatan kapasitas fiskal daerah dalam mendukung

pelaksanaan tata kelola keuangan yang akuntabel. Bagi lembaga pemeriksa dan pemangku kepentingan lainnya, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai keterkaitan antara hasil audit dan kinerja pemerintah daerah. Selain itu, penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik mengkaji isu-isu terkait pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas publik, dan kemandirian fiskal.